

**MENIMBANG BERBAGAI ALTERNATIF PENYESUAIAN HARGA BAHAN
BAKAR MINYAK PREMIUM DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEREKONOMIAN**
*Assessing Alternatives for Premium's Fuel Price Adjustment and Its
Impacts to the Economy*

Anda Nugroho¹, Hidayat Amir², Verina J. Wargadalam³

¹Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal,
Email: anda.nugroho@depkeu.go.id

²Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal,
Email: hamir@fiskal.depkeu.go.id

³Puslitbang Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE),
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Email: verinawargadalam@yahoo.com

Naskah diterima: 25 September 2015
Naskah direvisi: 26 November 2015
Disetujui diterbitkan: 7 Desember 2015

Abstract

This study simulates the impacts of various alternatives on the adjustment of the fuel price, particularly gasoline, in order to find the best option with harmless impacts to the economy. Two set simulations with seven alternative of price adjustments in each set are evaluated with the assistance of INDOCEEC model, a dynamic computable general equilibrium model which is constructed to focus on the analysis on the impacts of energy policy. The results of this study reveal that the quarterly adjustment of fuel price with fixed subsidy mechanism and combined with cash transfer policy to the poor households might be considered as the most appropriate policy approach.

Keywords: subsidy, gasoline, CGE, energy

Abstrak

Kajian ini menyimulasikan dampak berbagai alternatif penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis premium, dengan tujuan untuk mendapatkan pilihan alternatif yang paling baik bagi perekonomian. Dua set simulasi masing-masing dengan tujuh alternatif penyesuaian harga yang dianalisis dengan menggunakan Model INDOCEEC, sebuah model keseimbangan umum dinamik yang didesain dengan fokus untuk analisis dampak kebijakan energi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga premium secara kuartalan melalui mekanisme subsidi tetap dengan penyesuaian harga dan dikombinasikan dengan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai bagi rumah tangga miskin dapat menjadi pilihan kebijakan yang paling layak untuk dipertimbangkan.

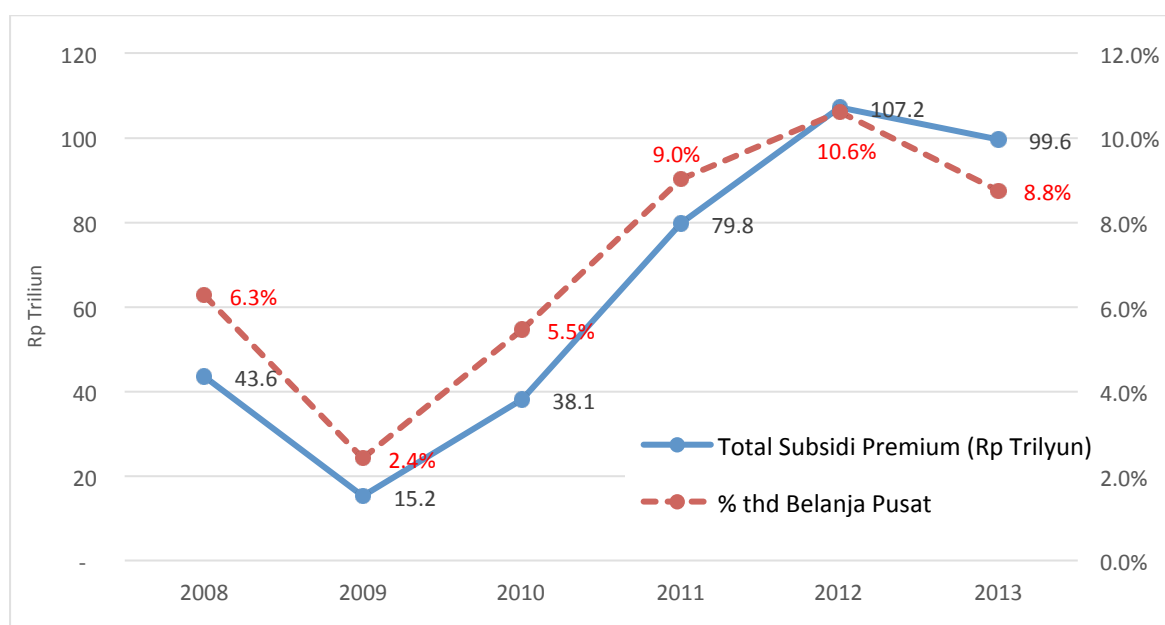
Kata kunci: subsidi, premium, CGE, energi

Klasifikasi JEL: C68, H53, Q43

I. PENDAHULUAN

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendesak untuk segera dilaksanakan. Saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menderita tekanan fiskal yang cukup berat karena makin besarnya alokasi subsidi BBM. Harga konsumen dari BBM bersubsidi ditentukan oleh pemerintah, dan ditetapkan di bawah harga keekonomian yang seharusnya. Oleh karena itu, Pemerintah harus menyediakan subsidi untuk menutup selisih antara harga konsumen dan harga keekonomian tersebut.

Gambar 1.1 menunjukkan realisasi besaran subsidi BBM jenis premium yang dibayarkan oleh pemerintah dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2013. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, nilai subsidi BBM jenis premium sudah melonjak lebih dari dua kali lipat. Pada tahun 2008 subsidi Premium mencapai Rp43,6 triliun, namun pada tahun 2013 nilainya sudah mencapai Rp99,6 triliun. Dari sisi proporsi, maka nilainya naik dari 6,3% terhadap total belanja pemerintah pusat pada 2008 menjadi 8,8% pada 2013. Apabila ditambah dengan subsidi energi lainnya (subsidi solar, minyak tanah, elpiji, dan listrik), maka total subsidi energi mencapai lebih dari 27% terhadap total belanja pemerintah pusat pada tahun 2013.



Sumber: LKPP 2008 s.d. 2013

Gambar 1.1. Realisasi Subsidi Premium 2008-2013

Tingginya proporsi subsidi energi khususnya premium menambah tekanan fiskal bagi pemerintah, belum lagi *mandatory spending* lain yang harus dialokasikan dalam APBN. Kondisi tersebut membuat *fiscal space* yang dimiliki pemerintah semakin kecil, sehingga alokasi kepada belanja yang sifatnya lebih produktif seperti belanja modal, menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mencari solusi atas permasalahan yang muncul akibat subsidi BBM tersebut.

Sebetulnya subsidi BBM merupakan masalah klasik yang telah lama menjadi diskusi baik oleh para akademisi maupun pengambil kebijakan. Intensitas diskusi semakin meningkat ketika terjadi fluktuasi harga minyak internasional yang relatif tinggi seperti pada tahun 2005, yang memaksa pemerintah untuk mengurai subsidi BBM dengan menaikkan harga pada 1 Maret 2005 (Ikhsan *et al.*, 2005; Oktaviani & Sahara, 2005) dan kenaikan untuk kedua kalinya pada 1 Oktober 2005 (Yusuf

&Resosudarmo, 2008). Penyesuaian harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia ini pun kembali berulang pada tahun 2008. Kini, masalah subsidi BBM kembali menyeruak, namun isunya sedikit bergeser yaitu tidak hanya bagaimana dampaknya jika terjadi pengurangan subsidi namun bagaimana pengurangan subsidi BBM memiliki dampak negatif penyesuaian harga yang minimal (Aswicahyono *et al.*, 2011; Rachbini *et al.*, 2013). Salah satu alternatif yang muncul ialah dengan penerapan subsidi tetap per liter (Amir, 2012 & 2014).

Subsidi yang dibayar oleh pemerintah tergantung oleh beberapa faktor, sebagaimana terlihat dalam formula subsidi BBM berikut:

Persamaan-1: Formula Subsidi BBM

$$\text{Subsidi} = (\text{Harga Patokan} - \text{Harga BBM Subsidi tanpa pajak}) \times \text{Volume} \quad (1)$$

$$\text{Subsidi}_i = \left[\frac{\text{MOPS}_i \times \text{Er}}{158.9} + \text{Alpha}_i - \frac{\text{Pb}_i}{1 + \text{tn} + \text{tb}} \right] \times \text{Qb}_i$$

Keterangan:

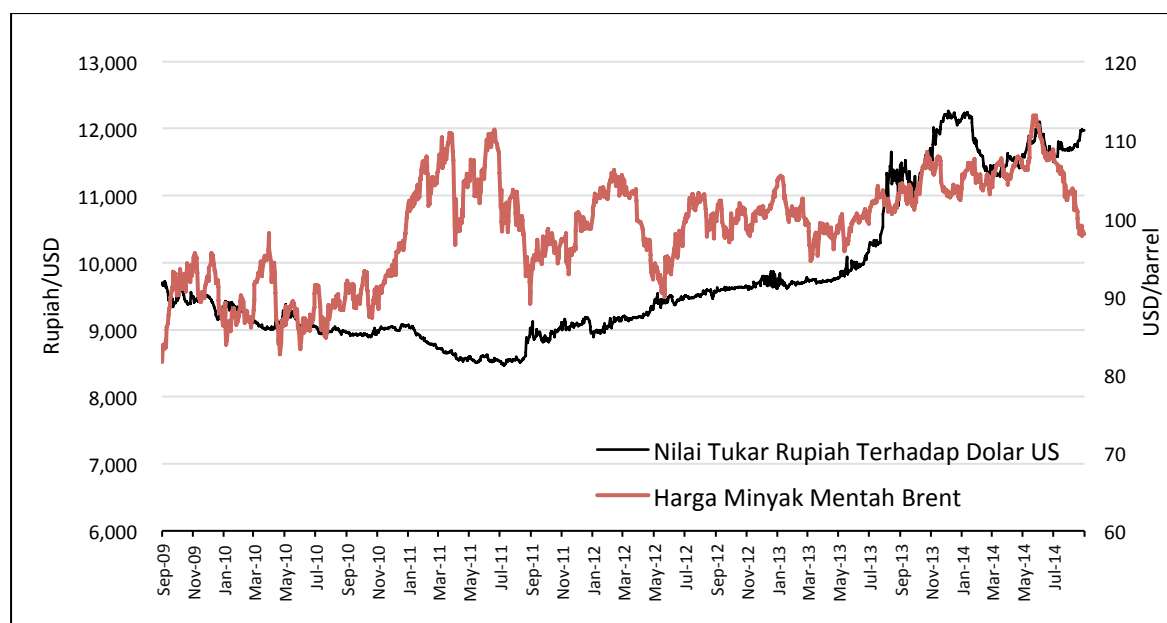
- MOPS* = Harga Patokan Beredar Mean of Platts Singapore (USD/barel)
- Er* = Nilai Tukar Rupiah (Rp/ USD)
- Alpha* = Biaya Distribusi dan margin usaha (Rp/Liter)
- Pb* = Harga BBM Bersubsidi (Rp/liter)
- tn* = Pajak Pertambahan Nilai (10%)
- tb* = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBBKB (5%, tidak dikenakan pada minyak tanah)
- Qb* = Konsumsi BBM Bersubsidi (liter)
- i* = Jenis BBM Bersubsidi (premium, solar, minyak tanah)

Sumber: Nasir & Insyafiah (2012)

Berdasarkan formula di atas maka besaran subsidi BBM yang ditanggung oleh pemerintah dihitung berdasarkan harga patokan BBM dikurangi dengan harga BBM subsidi tanpa pajak, kemudian dikalikan dengan volume konsumsi. Harga patokan BBM ditentukan oleh dua variabel utama yang sangat fluktuatif yaitu harga patokan beredar *Mean of Platts Singapore (MOPS)* dan nilai tukar rupiah (*Er*). Sebagai gambaran, Gambar 1.2 menunjukkan fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah selama lima tahun terakhir (September 2009 s.d. September 2014).

Selama ini pemerintah menggunakan MOPS sebagai acuan harga minyak internasional dalam perhitungan nilai subsidi. MOPS adalah ukuran harga BBM jenis *fuel* yang diperdagangkan di Singapura. Dikarenakan harga patokan minyak MOPS sulit diperoleh, maka pada Gambar 1.2 harga patokan minyak disubstitusi dengan harga patokan minyak mentah Brent. Namun demikian, baik MOPS maupun Brent memiliki arah pergerakan yang sama (Amir, 2014).

Pada lima tahun terakhir, nilai tukar Rupiah bergerak pada rentang antara Rp8.464,00 per USD s.d. Rp12.261,00 per USD dengan kecenderungan terus mengalami pelemahan. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata, Rupiah mengalami pelemahan hampir 7% per tahun. Disamping volatilitas nilai tukar rupiah, volatilitas harga minyak internasional juga turut menyumbang bengkaknya besaran subsidi BBM. Pada periode yang sama, harga minyak dunia bergerak fluktuatif pada rentang antara USD113,09 per barel s.d. USD80,73 per barel, dengan kecenderungan naik. Selama periode tersebut, harga minyak mentah dunia rata-rata mengalami kenaikan lebih dari 4% per tahun.



Sumber: Bloomberg

Gambar 1.2. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah dan Harga Minyak Mentah

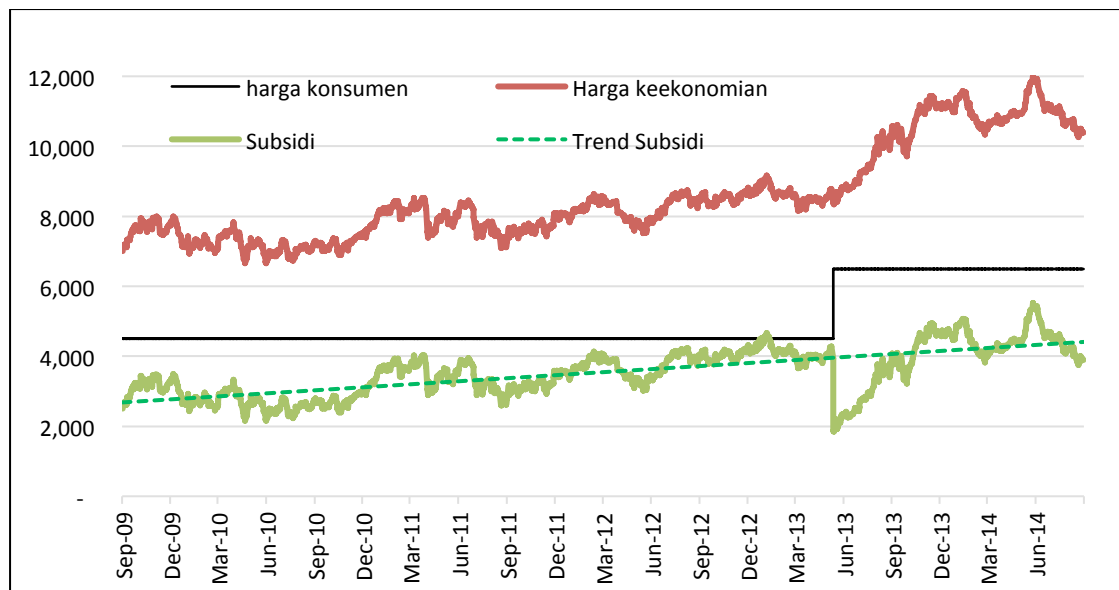
Kontras dengan nilai tukar rupiah dan harga minyak internasional yang fluktuatif, harga konsumen premium hanya beberapa kali mengalami penyesuaian, bahkan sempat mengalami penurunan harga.

Tabel 1.1. Harga Premium Periode 2005 s.d. 2013

	Periode	Harga Premium per liter
2005	1 Maret	Rp2.400,00
	1 Oktober	Rp4.500,00
2008	24 Mei	Rp6.000,00
	1 Desember	Rp5.500,00
	15 Desember	Rp5.000,00
2009	15 Januari	Rp4.500,00
2013	22 Juni	Rp6.500,00

Sumber: Amir (2014)

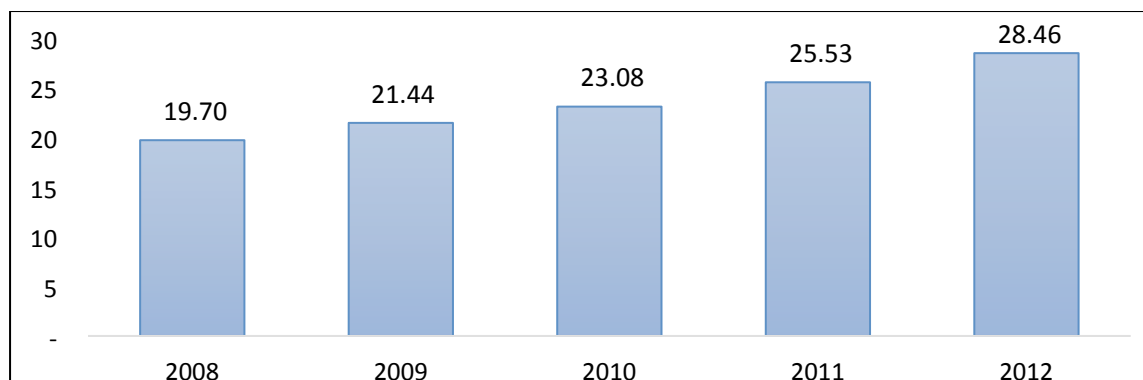
Tabel 1.1 menunjukkan penyesuaian harga BBM jenis premium dalam kurun waktu 10 tahun (2005 s.d. 2014). Pada periode tersebut, tercatat terjadi tujuh kali penyesuaian harga premium. Harga premium hanya empat kali mengalami kenaikan, sedang sisanya (tiga kali) justru mengalami penurunan. Hal tersebut berimplikasi pada makin besarnya nilai subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.



Sumber: Pertamina dan perhitungan penulis; dalam Rp/liter
Gambar 1.3. Harga Konsumen dan Harga Keekonomian Premium

Gambar 1.3 menyajikan perbandingan antara harga konsumen dan harga keekonomian premium. Harga konsumen merupakan harga premium yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan harga keekonomian meliputi biaya produksi, dan distribusi premium plus pajak dan margin keuntungan (harga premium tanpa subsidi). Harga keekonomian yang digambarkan pada Gambar 1.3 merupakan hasil perhitungan/perkiraan penulis berdasarkan nilai subsidi yang diberikan pada tahun yang bersangkutan, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan fluktuasi harga minyak dunia. Semakin besar selisih antara harga harga konsumen dan harga keekonomian, maka subsidi yang harus disediakan pemerintah juga semakin besar, bahkan pada bulan Januari 2012 besaran subsidi per liter sempat lebih besar daripada harga konsumen per liternya.

Selain nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia yang sifatnya fluktuatif, nilai subsidi BBM yang ditanggung oleh pemerintah juga ditentukan oleh volume konsumsi BBM yang cenderung meningkat setiap tahun (Gambar 1.4).



Sumber: Pusdatin ESDM, 2013
Gambar 1.4. Konsumsi Premium dalam Juta Kilo Liter (KL)

Faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, yaitu: (i) pelemahan nilai tukar rupiah, (ii) kenaikan harga minyak dunia, serta (iii) peningkatan konsumsi premium, membuat besaran subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Fakta menunjukkan bahwa

total subsidi premium dalam kurun waktu lima tahun (2008 s.d. 2013) sudah melonjak lebih dari dua kali lipat.

Kondisi tersebut membuat penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi tidak terelakkan. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan kebijakan tersebut tidak menyakiti perekonomian dan kesejahteraan rumah tangga. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai berbagai alternatif penyesuaian harga BBM bersubsidi jenis premium.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sudah cukup banyak studi sebelumnya yang menganalisis mengenai subsidi BBM, diantaranya: Ikhsan *et al.* (2005), Oktaviani & Sahara (2005), Yusuf & Resosudarmo (2008, 2011), Aswicahyono *et al.* (2011), Dartanto (2013), dan Setyawan (2014). Kajian tersebut mewakili diskusi mengenai kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap perekonomian pada periode antara tahun 2004 dan 2013 dimana pada periode ini terjadi gejala kenaikan harga minyak internasional yang sangat besar. Pada tahun 2003, harga minyak di pasar internasional hanya berada di bawah USD23 per barel, terus mengalami tendensi kenaikan sampai dengan puncaknya pada tahun 2008 yang melampaui angka USD140 per barel. Namun di awal tahun 2009 mengalami *rebound* ke level sekitar USD40 per barel. Namun tidak berlangsung lama, harga minyak internasional kembali melonjak ke level sekitar USD90 – USD110 per barel di tahun 2011 s.d. 2013.

Ikhsan *et al.* (2005) menganalisis dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2005 terhadap kemiskinan dengan menggunakan Model INDOCEEM, sebuah model *Computable General Equilibrium* (CGE) yang dikembangkan pada tahun 2002 untuk Kementerian ESDM yang bertujuan untuk melakukan analisis dampak kebijakan energi, dan diintegrasikan dengan metode dampak kemiskinan yang dikembangkan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Dari hasil simulasi diperoleh informasi bahwa kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan absolut, namun demikian tingkat kemiskinan justru akan menurun jika kebijakan kenaikan harga BBM disertai dengan program kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan.

Pada tahun yang sama, Oktaviani & Sahara (2005) juga melakukan evaluasi dampak kenaikan harga BBM sebesar 29% pada 1 Maret 2005. Oktaviani & Sahara (2005) menggunakan model CGE *Recursive Dynamic* yang merupakan pengembangan lanjut dari Model INDOF (Oktaviani, 2000). Model ini telah memiliki *feature* kelompok rumah tangga sebagaimana dalam klasifikasi SNSE 2000 mengikuti pendekatan dalam Model Wayang (Witwar, 1999). Hasil analisisnya menyimpulkan bahwa kenaikan harga BBM baik sebelum maupun setelah program kompensasi mengakibatkan menurunnya daya beli pada setiap kelompok rumah tangga. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan nominal sebagai hasil program kompensasi masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan dampak inflasi. Lebih lanjut, kompensasi di bidang pendidikan dan kesehatan saja ternyata tidak cukup memadai untuk meredam dampak kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Walaupun sama-sama menggunakan Model CGE, penelitian Oktaviani & Sahara (2005) memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian Ikhsan *et al.* (2005). Perbedaan ini sempat mengundang polemik di media masa pada saat itu. Tentunya perbedaan ini merupakan sesuatu yang biasa dalam dunia akademis, walaupun menggunakan rumpun pemodelan yang sama, tetapi setiap asumsi yang dibangun oleh setiap peneliti bisa saja terjadi. Tidak hanya dalam proses pengembangan model yang berbeda, namun proses mentransformasikan sebuah kebijakan menjadi suatu *shock* dalam simulasi pun sering berbeda. Misalnya dalam hal ini ialah bagaimana kedua

penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan simulasi untuk estimasi kebijakan program kompensasi.

Kemudian Yusuf & Resosudarmo (2008, 2011) masih melakukan evaluasi dampak kebijakan kenaikan harga BBM bagi kesejahteraan rumah tangga, tetapi untuk paket kebijakan Oktober 2005 yaitu periode kenaikan harga BBM yang kedua kalinya pada tahun 2005. Yusuf & Resosudarmo (2008) menggunakan Model Indonesia-E3, yaitu Model CGE yang memiliki representasi rumah tangga (200 rumah tangga) yang secara terintegrasi sudah ada di dalam modelnya untuk menggambarkan distribusi pendapatan; 100 di perkotaan dan 100 di pedesaan. Dengan model ini, Yusuf & Resosudarmo (2008) menyimpulkan bahwa kenaikan harga BBM untuk transportasi (bensin dan solar) merupakan sesuatu yang baik untuk mereformasi kebijakan subsidi, namun kenaikan harga minyak tanah (kerosene) cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan khususnya di perkotaan. Program kompensasi dalam bentuk *cash transfer* dengan jumlah yang seragam mengakibatkan dampak yang berbeda, kaum miskin di pedesaan mengalami *over-compensated* namun sebaliknya bagi kaum miskin di perkotaan. Kompensasi dalam bentuk yang lain, yaitu subsidi pendidikan dan kesehatan tidak terlalu efektif untuk memitigasi dampak kenaikan harga BBM.

Dartanto (2013) melakukan evaluasi yang sejenis yaitu untuk melihat dampak pengurangan subsidi BBM terhadap fiskal dan kemiskinan dengan menggunakan model CGE-*microsimulation*. Salah satu temuan pentingnya dari simulasi kebijakan yang dilakukan ialah bahwa penghapusan subsidi BBM sebesar 25% akan mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,259 poin. Sementara jika semua penghematan dari pengurangan subsidi tersebut kembali direalokasikan dalam bentuk belanja pemerintah dan transfer maka justru akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,27 poin.

Studi oleh Aswicahyono *et al.* (2011) dan Setyawan (2014) tidak menggunakan model CGE tetapi menggunakan analisis *Social Accounting Matrix* (SAM) dan Input-Output (IO). Kedua data ini menjadi sumber data utama dalam pengembangan model CGE. Walaupun memiliki keterbatasan dalam pemodelan dibanding analisis dengan model CGE, kedua analisis tersebut masih dalam rumpun analisis dampak yang sama yaitu menggunakan asumsi keseimbangan umum dalam perekonomian. Studi Aswicahyono *et al.* (2011) menyimpulkan bahwa subsidi BBM tidak hanya mengganggu rasa keadilan karena sebagian besar dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi, tetapi juga telah menimbulkan biaya ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, sebaiknya subsidi BBM dihapuskan. Jika penghapusan ini dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial-keamanan maka dapat dilakukan secara bertahap. Rekomendasi ini sejalan dengan hasil studi Setyawan (2014) yang menyarankan agar dilakukan kenaikan bertahap agar dampaknya terhadap kenaikan komoditas strategis dapat terantisipasi secara lebih baik.

Dengan mempertimbangkan berbagai studi terdahulu tersebut, maka studi ini berharap dapat melengkapi diskusi bagaimana penghapusan subsidi BBM atau kenaikan harga BBM dapat dilakukan secara lebih baik. Kajian ini mencoba mengembangkan lanjut model CGE yang ada untuk memiliki kemampuan analisis antar-waktu dengan pola perubahan kuartalan yaitu menjadi model CGE *recursive dynamic*. Dengan model ini akan disimulasikan berbagai skenario alternatif kenaikan harga BBM, dengan pilihan alternatif kenaikan sekaligus, bertahap dan dengan skema subsidi tetap per liter baik tanpa atau dengan menggunakan program kompensasi bantuan langsung tunai (BLT).

III. METODOLOGI

3.1. Metodologi

Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Model *Indonesia Clean Energy and Energy Conservation* (INDOCEEC); yaitu sebuah model CGE yang dikembangkan untuk analisis

dampak kebijakan energi bersih, energi baru-terbarukan, dan konservasi energi. Model INDOCEEC merupakan model pengembangan lanjut dari model INDOFISCAL (Amir, 2011; Amir *et al.*, 2013) yang memiliki *feature* dinamik (*recursive dynamic*) dengan mengadopsi *feature* ORANIG-RD (Horridge, 2002). Sementara untuk klasifikasi energinya mengikuti pola Model INDOCEEM. Selain itu, model ini melakukan pengembangan lanjut dari apa yang telah ada di INDOCEEM untuk mengakomodasi pertumbuhan industri baru (*baby industries*) di bidang energi baru-terbarukan (*new energy and renewable energy*). Untuk perlakuan dalam mengkombinasikan penggunaan informasi dari data Tabel *Input-Output* dan *Social Accounting Matrix* dalam database model, digunakan pendekatan yang dilakukan dalam model PHILGEM (Corong & Horridge, 2012).

Kelebihan model CGE ini adalah mampu menangkap interaksi pasar baik dari sisi kuantitas maupun harga di sektor energi termasuk energi baru-terbarukan secara lebih detail, dikarenakan komoditas/industri energi dalam model sudah didisagregasi dari klasifikasi standar Tabel IO untuk memunculkan komoditas/industri energi baru-terbarukan. Dengan adanya komoditas energi yang terdisagregasi maka analisis kebijakan energi dapat dilakukan dengan lebih detail dan akurat. Sebagai contoh, kebijakan kenaikan harga bisa dilakukan per jenis komoditas energi.

Selain itu, model yang digunakan juga mengakomodasi ruang lingkup fiskal pemerintah, sehingga dampak dari masing-masing kebijakan terhadap berbagai aspek pendapatan/belanja pemerintah dapat ditelusuri. Model juga sudah memiliki *feature* dinamik, sehingga analisis dapat dilakukan secara periodik, baik tahunan maupun kuartalan. Data yang digunakan dalam model adalah Tabel IO dan SAM tahun 2008, serta informasi industrial sektor energi sebagai bahan untuk melakukan proses disagregasi.

3.2. Skenario Simulasi Alternatif Kebijakan Penyesuaian Harga Premium

Terdapat tujuh simulasi (SIM1 s.d. SIM7) yang akan disimulasikan, masing-masing dalam dua *set* alternatif kebijakan untuk mensimulasikan berbagai alternatif kebijakan penyesuaian harga premium. Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. *Set* Alternatif Kebijakan Penyesuaian Harga Premium

Alternatif Kebijakan I: Penyesuaian Harga Premium	Alternatif Kebijakan II: Penyesuaian Harga Premium Disertai BLT
(i) SIM1A - harga Premium naik Rp1.000,	(i) SIM1B - harga Premium naik Rp1.000, disertai BLT
(ii) SIM2A - harga Premium naik Rp2.000,	(ii) SIM2B - harga Premium naik Rp2.000, disertai BLT
(iii) SIM3A - harga Premium naik Rp3.000,	(iii) SIM3B - harga Premium naik Rp3.000, disertai BLT
(iv) SIM4A - harga Premium naik bertahap Rp1.000 per triwulan (3 kali kenaikan), mulai Q4-2014 s.d. Q2-2015,	(iv) SIM4B - harga Premium naik bertahap Rp1.000 per triwulan (3 kali kenaikan), mulai Q4-2014 s.d. Q2-2015, disertai BLT pada periode pertama
(v) SIM5A - mekanisme subsidi tetap premium, Rp3.000 per liter, penyesuaian harga dilakukan per triwulan	(v) SIM5B - mekanisme subsidi tetap premium, Rp3.000 per liter, penyesuaian harga dilakukan per triwulan, disertai BLT pada periode pertama
(vi) SIM6A - mekanisme subsidi tetap premium, Rp2.000 per liter, penyesuaian harga dilakukan per triwulan	(vi) SIM6B - mekanisme subsidi tetap premium, Rp2.000 per liter, penyesuaian harga dilakukan per triwulan, disertai BLT pada periode pertama
(vii) SIM7A - Penghapusan subsidi premium	(vii) SIM7B - Penghapusan subsidi premium, disertai BLT pada periode pertama

Kenaikan harga premium diasumsikan diberlakukan mulai awal Kuartal 4-2014 (Q4-2014). Pada SIM1, SIM2, dan SIM3, kenaikan harga premium hanya dilakukan satu kali, sedangkan pada SIM4 kenaikan harga premium dilakukan secara bertahap, yaitu Rp1.000/liter per kuartal. Kenaikan tersebut diberlakukan selama tiga kuartal secara berturut-turut, sehingga akumulasi kenaikan harga premium mencapai Rp3.000/liter.

Sementara pada SIM5 dan SIM6, skenario kebijakan yang diterapkan adalah subsidi tetap per liter. Pemerintah tidak menetapkan harga konsumen terhadap komoditas premium, melainkan memberikan subsidi yang jumlahnya tetap per satu satuan liter premium. Pada SIM5 pemerintah memberi subsidi tetap Rp3.000 per liter premium, sedangkan pada SIM6 pemerintah memberikan subsidi tetap Rp2.000 per liter premium. Pemberian subsidi tetap ini dimaksudkan agar pemerintah dapat lebih mengontrol besaran subsidi yang dikeluarkan. Selain itu dengan adanya subsidi tetap maka risiko volatilitas harga minyak dan nilai tukar rupiah tidak ditanggung oleh pemerintah. Terakhir, SIM7 merupakan simulasi penghapusan subsidi premium. Pada simulasi tersebut pemerintah tidak lagi memberikan subsidi terhadap premium (premium dijual dengan harga keekonomiannya).

Ketujuh simulasi diatas (SIM1 s.d. SIM7) masing-masing akan disimulasikan dengan dua set alternatif kebijakan. Pada set alternatif kebijakan pertama, simulasi yang dijalankan yaitu hanya kebijakan penyesuaian harga premium, sedangkan set alternatif kebijakan kedua, kebijakan penyesuaian harga premium akan disertai dengan pemberian *cash transfer* atau bantuan langsung tunai (BLT). Pada set alternatif kebijakan yang pertama, uang yang terkumpul dari penghematan subsidi premium akan disimpan oleh pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran (tidak di re-alokasikan). Pada set alternatif kebijakan yang kedua, 50% dari uang yang terkumpul dari penghematan subsidi premium akan di re-alokasikan untuk pemberian BLT kepada rumah tangga, dan sisanya akan disimpan oleh pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran.

Tabel 3.2. Skenario harga Premium dalam rupiah per liter

	2014-q3	2014-q4	2015-q1	2015-q2	2015-q3	2015-q4
SIM1 - naik Rp1.000	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
SIM2 - naik Rp2.000	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
SIM3 - naik Rp3.000	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
SIM4 - naik bertahap Rp1.000 per triwulan (tiga kali kenaikan)	6.500	7.500	8.500	9.500	9.500	9.500
SIM5 - subsidi tetap Rp3.000 per liter (penyesuaian harga per-kuartal)	6.500	7.157	7.252	7.080	7.251	7.092
SIM6 - subsidi tetap Rp2.000 per liter (penyesuaian harga per-kuartal)	6.500	8.157	8.252	8.080	8.251	8.092
SIM7 - penghapusan subsidi	6.500	10.157	10.252	10.080	10.251	10.092
Asumsi:						
<i>Forecast</i> harga minyak mentah USD/barel (sumber: Bloomberg)	105	107	107	105	106	105
<i>Forecast</i> nilai tukar rupiah per USD (sumber: Bloomberg)	11.739	11.823	11.895	11.939	11.971	11.904

Pada Tabel 3.2 disajikan harga premium per kuartal sesuai dengan masing-masing skenario kebijakan yang diuraikan di atas.

Untuk menentukan harga premium perliter pada SIM5, SIM6, dan SIM7, model menggunakan nilai *forecast* harga minyak mentah Brent dan nilai tukar rupiah yang diperoleh dari Bloomberg. Nilai *forecast* untuk kedua variabel tersebut merupakan kompilasi dari berbagai lembaga *forecast* independen. Berdasarkan asumsi yang digunakan, maka harga keekonomian premium pada periode kuartal ke-3 2014 sampai dengan kuartal ke-4 2015 diperkirakan berada pada kisaran Rp11.739 s.d. Rp11.939 per liter.

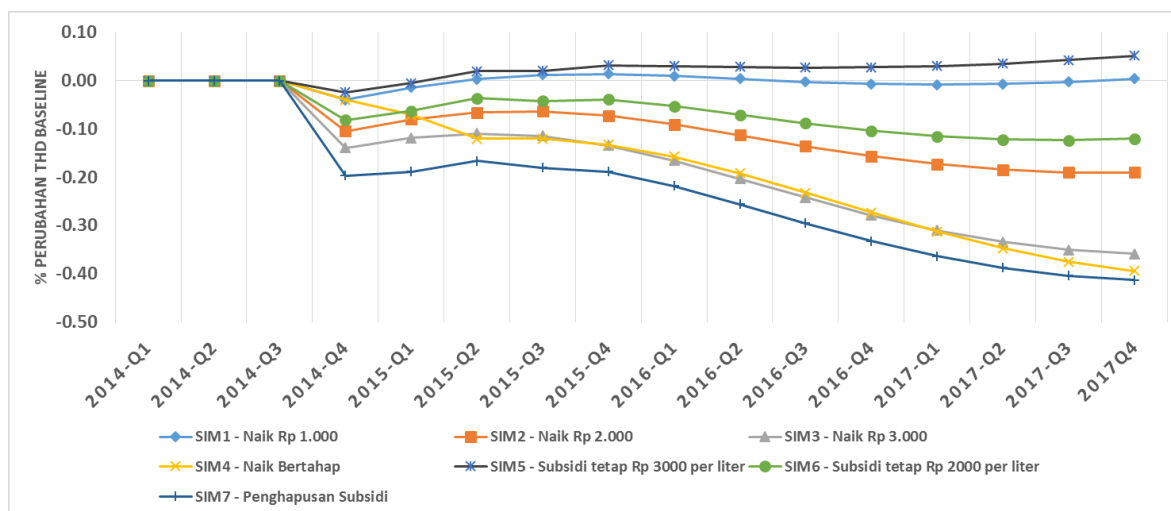
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dampak Berbagai Alternatif Kebijakan Penyesuaian Harga Premium

Analisis dampak kebijakan penyesuaian harga premium lebih ditekankan pada jangka pendek (dampak kuartal pertama s.d. tahun pertama) sampai dengan jangka menengah. Hal tersebut bertujuan agar dampak dari kebijakan dapat dikalkulasi dengan lebih baik sehingga pemerintah dapat mempersiapkan respon kebijakan yang tepat. Dalam melakukan simulasi, *shock* diberikan melalui variabel harga premium. Besaran *shock* yang diberikan disesuaikan dengan berbagai skenario sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2. Dampak dari masing-masing alternatif kebijakan penyesuaian harga premium akan dianalisis dari sisi makro: perubahan pada GDP, sampai pada sisi mikro yaitu konsumsi rumah tangga.

Gambar 4.1 menggambarkan dampak dari berbagai alternatif kebijakan penyesuaian harga premium terhadap GDP. Pada level makro, dampak agregat dari kebijakan penyesuaian harga premium dapat dilihat dari terpengkasnya pertumbuhan GDP, sehingga menjadi lebih rendah daripada *baseline*. Dalam jangka pendek, satu kuartal setelah dilakukan penyesuaian harga premium (akhir Q4 2014), semua alternatif kebijakan penyesuaian harga premium (SIM1A s.d. SIM6A) mempunyai dampak net negatif terhadap perekonomian. Pada akhir Kuartal-4 2014, kenaikan harga premium sebesar Rp1.000 (SIM1A) akan membuat GDP lebih rendah 0,04% dibandingkan *baseline*, sedangkan kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 (SIM2A) akan membuat GDP lebih rendah 0,1% dibandingkan *baseline*, dan kenaikan harga premium sebesar Rp3.000 (SIM3A) akan membuat GDP lebih rendah 0,14% daripada *baseline*. Masih pada akhir Kuartal-4 2014, penyesuaian harga premium secara bertahap pada SIM3A akan membuat GDP lebih rendah 0,04% daripada *baseline*, sedangkan kebijakan subsidi tetap yang diterapkan dalam SIM5A (subsidi tetap Rp3.000/liter) dan SIM6A (subsidi tetap Rp2.000/liter) masing-masing akan membuat GDP lebih rendah 0,02% dan 0,08% daripada *baseline*. Pada SIM7a (penghapusan subsidi) GDP akan menjadi lebih rendah 0,2% daripada *baseline*. Terpengkasnya GDP tersebut terutama diakibatkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan harga premium dan harga komoditas lainnya yang terpengaruh. Di lain pihak, kebijakan tersebut mampu menghasilkan penghematan subsidi masing-masing sebesar Rp14,1 triliun, Rp19,2 triliun, Rp22,8 triliun, Rp24triliun, Rp10,5 triliun, Rp17,8 triliun, dan Rp25,66 triliun (penghematan subsidi Q4 2014).

Namun demikian, pada akhir kuartal ketiga sejak kenaikan harga premium ditetapkan (Q2 2015) terdapat dua alternatif kebijakan yang mempunyai dampak net positif terhadap GDP yaitu alternatif kebijakan SIM1A (kenaikan harga premium Rp1.000) dan SIM5A (subsidi tetap Rp3.000/liter). Apabila pemerintah ingin menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, maka alternatif kebijakan SIM1A dan SIM5A dapat dipertimbangkan. Pada kuartal ke-2 2015 kenaikan harga premium sebesar Rp1.000 (SIM1A) akan membuat GDP lebih tinggi 0,003% daripada *baseline*, sedangkan kebijakan subsidi tetap Rp3.000/liter (SIM5A) akan membuat GDP lebih tinggi 0,002% daripada *baseline*.



Sumber: Hasil Simulasi

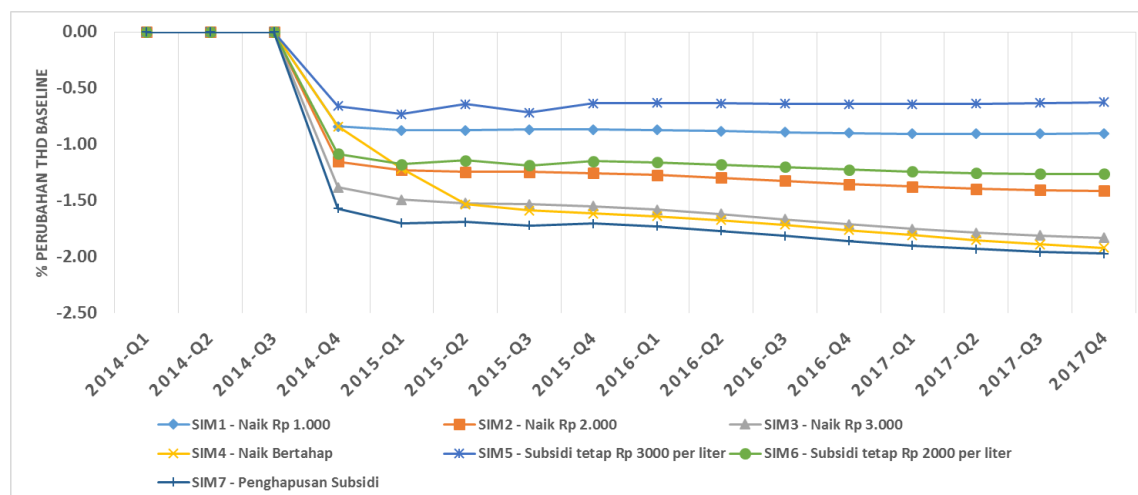
Gambar 4.1. Dampak Penyesuaian Harga Premium Terhadap GDP(% perubahan terhadap *baseline*)

Selanjutnya, dalam jangka menengah (Q4 2017), alternatif kebijakan pada SIM1A dan SIM5A akan akan membuat GDP lebih tinggi daripada *baseline* masing-masing sebesar 0,004% dan 0,05%, sedangkan alternatif kebijakan lainnya SIM2A, SIM3A, SIM4A, SIM6A dan SIM7 akan akan membuat GDP lebih rendah daripada *baseline*, masing-masing sebesar 0,19%, 0,36%, 0,39%, 0,12%, dan 0,41%. Perubahan pada GDP terutama disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan harga premium serta komoditas lainnya yang terimbas. Gambar 4.2 menunjukkan penurunan konsumsi rumah tangga akibat kebijakan penyesuaian harga premium.

Semua alternatif kebijakan penyesuaian harga premium (SIM1A s.d. SIM7) mempunyai dampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga. Dalam jangka pendek, yaitu pada kuartal pertama sampai dengan satu tahun setelah kebijakan diterapkan, kenaikan harga premium sebesar Rp1.000 (SIM1A) akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 0,84% s.d. 0,87%, sedangkan kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 (SIM2A) akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 1,15% s.d. 1,25%, dan kenaikan harga premium sebesar Rp3.000 (SIM3A) akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 1,38% s.d. 1,53%.

Masih dalam jangka pendek, pada SIM4A penyesuaian harga premium secara bertahap akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 0,84% s.d. 1,59%. Alternatif penyesuaian harga premium secara bertahap pada SIM4A, dapat memberikan efek *consumption smoothing*.

Kebijakan subsidi tetap yang diterapkan dalam SIM5A (subsidi tetap Rp3.000/liter) akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 0,66% s.d. 0,72%, dan pada SIM6A (subsidi tetap Rp2.000/liter) membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 1,08% s.d. 1,19%. Kebijakan penghapusan subsidi pada SIM7 membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 1,57% s.d 1,72%.



Sumber: Hasil Simulasi

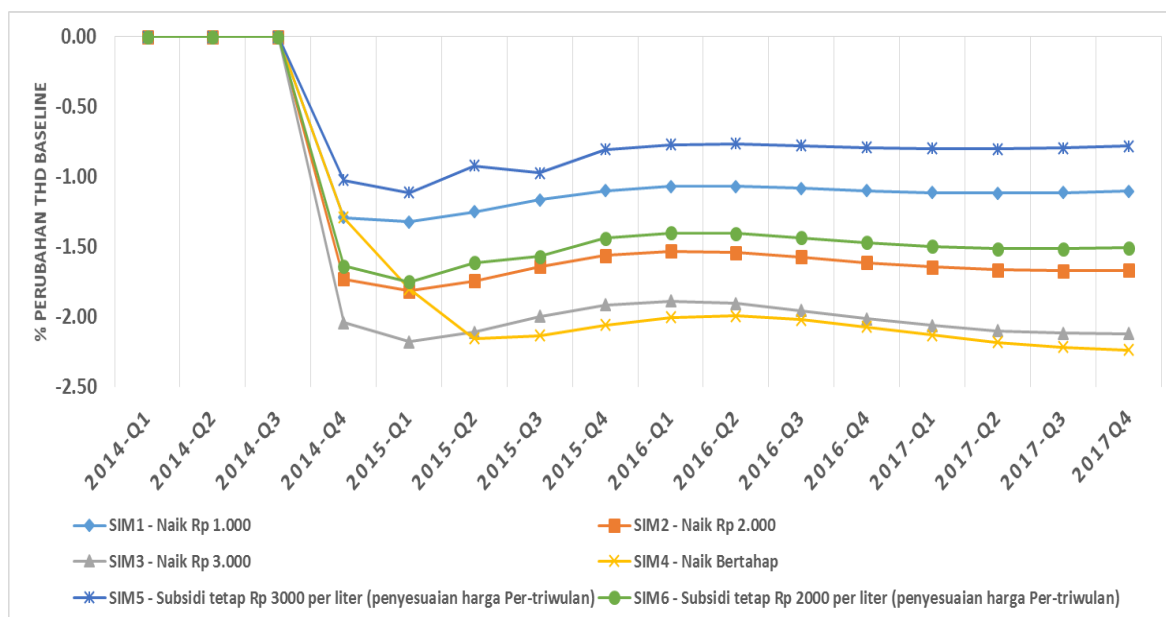
Gambar 4.2. Dampak Penyesuaian Harga Premium Terhadap Konsumsi Rumah Tangga (% perubahan terhadap *baseline*)

Pada jangka menengah, konsumsi berada pada kondisi yang relatif stabil (terjadi kondisi *equilibrium*). Pada akhir Q4 2017, alternatif kebijakan pada SIM1A, SIM2A, SIM3A, SIM4A, SIM5A, SIM6A dan SIM7 akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline*, masing-masing sebesar 0,91%, 1,39%, 1,78%, 1,85%, 0,64%, 1,25%, dan 1,9%. Dampak negatif terbesar pada konsumsi justru muncul ketika penyesuaian harga premium dilakukan secara bertahap pada SIM4 dan ketika subsidi premium benar-benar dihapus pada SIM7.

Ada hal yang menarik dari beberapa skenario penyesuaian harga premium di atas. Pada kebijakan subsidi tetap yang diterapkan dalam SIM5A (subsidi tetap Rp3.000/liter) dan SIM6A (subsidi tetap Rp2.000/liter) penyesuaian harga konsumen premium dilakukan per kuartal sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah sehingga dampaknya ke konsumsi rumah tangga lebih *smooth*. Dalam jangka panjang hal tersebut dapat meredam gejolak yang muncul di rumah tangga akibat penyesuaian harga premium.

Perlu dicermati bahwa pada seluruh alternatif kebijakan, konsumsi rumah tangga menjadi lebih rendah daripada *baseline*, baik pada jangka pendek maupun menengah. Hal tersebut dikarenakan konsumsi rumah tangga mengalami tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung akibat diberlakukannya kenaikan harga premium. Tekanan secara langsung berasal dari kenaikan harga komoditas, sedangkan tekanan secara tidak langsung berasal dari penurunan *disposable income*. Sejalan dengan hal tersebut, maka konsumsi rumah tangga perlu menjadi perhatian utama pemerintah ketika menerapkan kebijakan penyesuaian harga premium.

Selain pada sisi konsumsi, kenaikan harga premium juga akan mengakibatkan penyesuaian pada sisi produksi. Penyesuaian akan terjadi terhadap permintaan tenaga kerja maupun tingkat upah, sehingga penghasilan rumah tangga juga akan terpengaruh. *Disposable income* yang berasal dari penghasilan rumah tangga yang sudah dikurangi pajak menunjukkan ukuran daya beli rumah tangga. Gambar 4.3 menunjukkan dampak penyesuaian harga premium terhadap *disposable income*.



Sumber: Hasil Simulasi

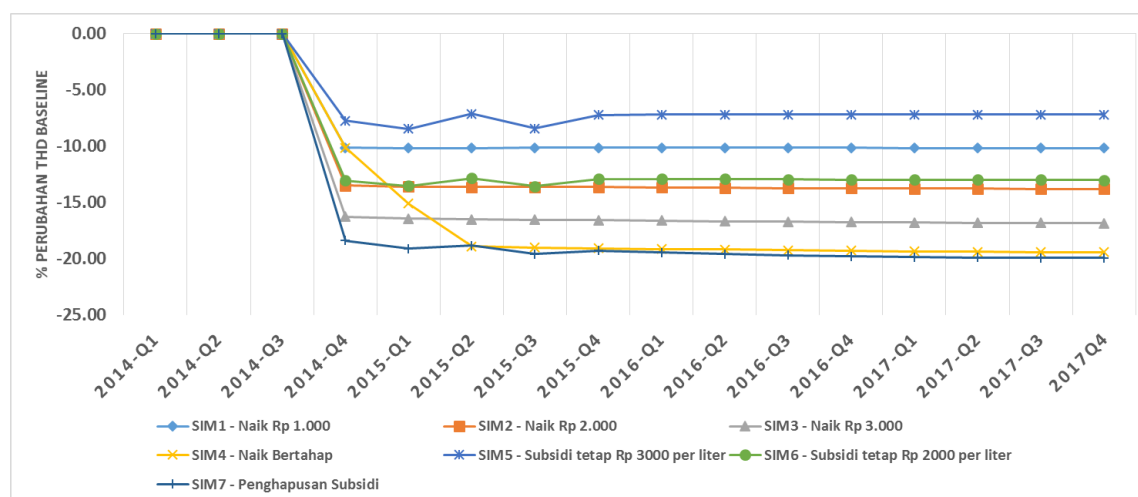
Gambar 4.3. Dampak Penyesuaian Harga Premium Terhadap *Disposable Income* Rumah Tangga (% perubahan terhadap *baseline*)

Kebijakan penyesuaian harga premium pada SIM1A sampai dengan SIM6A memberikan dampak negatif terhadap *disposable income* rumah tangga. Dalam jangka pendek, yaitu pada kuartal pertama sampai dengan satu tahun setelah kebijakan diterapkan, kenaikan harga premium sebesar Rp1.000 (SIM1A) akan membuat *disposable income* rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 1,16% s.d. 1,32%, sedangkan kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 (SIM2A) akan membuat *disposable income* rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 1,64% s.d. 1,82%, dan kenaikan harga premium sebesar Rp3.000 (SIM3A) akan membuat *disposable income* rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 2% s.d. 2,18%.

Penyesuaian harga premium secara bertahap SIM4A akan membuat *disposable income* rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 1,29% s.d. 2,16%. Kebijakan subsidi tetap yang diterapkan dalam SIM5A (subsidi tetap Rp3.000/liter) akan membuat *disposable income* rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 0,92% s.d. 1,11%, dan pada SIM6A (subsidi tetap Rp2.000/liter) akan membuat *disposable income* rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 1,57% s.d. 1,75%. Pada SIM7 (penghapusan subsidi) *disposable income* rumah tangga akan menjadi lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 2,16% s.d. 2,39%.

Pada jangka menengah, *disposable income* sudah berada pada kondisi *equilibrium* sehingga nilainya lebih stabil. Pada akhir Q4 2017, alternatif kebijakan pada SIM1A, SIM2A, SIM3A, SIM4A, SIM5A, SIM6A, dan SIM7A akan membuat *disposable income* rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* masing-masing sebesar 1,11%, 1,67%, 2,12%, 2,24%, 0,78%, 1,51%, dan 2,21%. Sama seperti pada variabel konsumsi, dampak negatif terbesar pada variabel *disposable income* muncul pada saat penyesuaian harga premium dilakukan secara bertahap pada SIM4A dan pada saat subsidi premium dihapus pada SIM7a.

Dari sisi mikro, penyesuaian harga premium diharapkan mampu menekan volume konsumsi premium, sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Gambar 4.4 menunjukkan dampak penyesuaian harga terhadap volume konsumsi premium.



Sumber: Hasil Simulasi

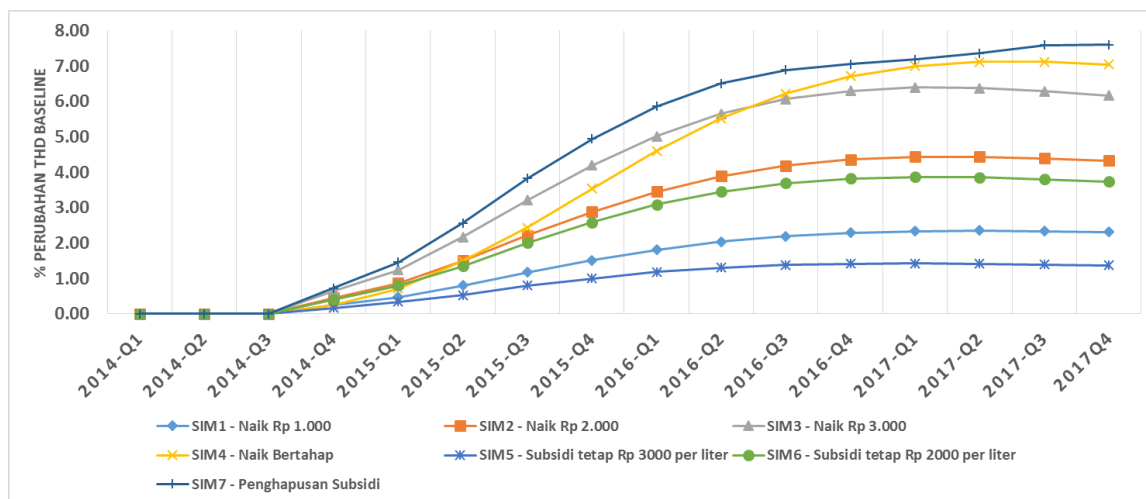
Gambar 4.4. Dampak Penyesuaian Harga Premium Terhadap Volume Konsumsi Premium (% perubahan terhadap *baseline*)

Kebijakan penyesuaian harga premium berhasil menekan volume konsumsi premium sehingga jumlahnya menjadi lebih rendah terhadap kondisi *baseline*. Penurunan volume konsumsi premium terjadi relatif cepat dalam jangka pendek. Pada kuartal pertama sampai dengan satu tahun setelah kebijakan diterapkan, kenaikan harga premium sebesar Rp1.000 (SIM1A) akan membuat volume konsumsi premium menjadi lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 10,14% s.d. 10,18%, sedangkan kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 (SIM2A) akan membuat volume konsumsi premium menjadi lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 13,49% s.d. 13,63%. Kenaikan harga premium sebesar Rp3.000 (SIM3) akan membuat volume konsumsi premium menjadi lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 16,44% s.d. 16,54%. Penyesuaian subsidi secara bertahap (SIM4A) akan membuat volume konsumsi premium menjadi lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 10,14% s.d. 19,02%. Selanjutnya, kebijakan subsidi tetap yang diterapkan dalam SIM5A (subsidi tetap Rp3.000/liter) dan SIM6A (subsidi tetap Rp2.000/liter) akan membuat volume konsumsi premium menjadi lebih rendah daripada *baseline*, masing-masing pada rentang 7,74% s.d. 8,47% dan 13,05% s.d. 13,56%. Pada SIM7A (penghapusan subsidi) volume konsumsi premium akan menjadi lebih rendah daripada *baseline*, pada rentang 18,41% s.d. 19,59%.

Pada jangka menengah (Q4 2017), alternatif kebijakan pada SIM1A, SIM2A, SIM3A, SIM4A, SIM5A, SIM6A, dan SIM7 akan membuat volume konsumsi premium lebih rendah daripada *baseline*, masing-masing sebesar 10,18%, 13,81%, 16,85%, 19,44%, 7,21%, 13,01%, dan 19,93%. Penurunan volume konsumsi premium terbesar terjadi pada SIM4A dan SIM7A, sedangkan penurunan volume konsumsi premium terkecil terjadi pada SIM5A. Apabila penurunan volume konsumsi premium yang menjadi target dari kebijakan ini, maka pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif kebijakan SIM1A s.d. SIM7A disesuaikan dengan target penghematan premium yang ditentukan.

Penurunan volume konsumsi premium pada jangka pendek masih bertahan pada jangka menengah. Hal tersebut dapat dilihat dari akumulasi penurunan volume konsumsi premium pada jangka menengah yang masih berada pada kisaran yang sama dengan jangka pendek. Artinya volume konsumsi premium dapat ditekan sehingga nilainya tidak kembali ke level awal. Hal tersebut menjadikan kebijakan penyesuaian harga premium menjadi kebijakan yang ramah lingkungan karena dapat meningkatkan efisiensi konsumsi energi. Selama ini harga yang disubsidi telah mendistorsi *market price* sehingga menyebabkan konsumsi yang boros.

Kenaikan harga premium juga akan memberikan efek substitutif, membuat sebagian konsumen beralih dari premium ke pertamax (BBM non-subsidi). Hal tersebut dikarenakan *range* harga antara premium dan pertamax menjadi lebih dekat setelah adanya penyesuaian harga. Pada Gambar 4.5. disajikan dampak kebijakan penyesuaian harga premium terhadap volume konsumsi pertamax.



Sumber: Hasil Simulasi

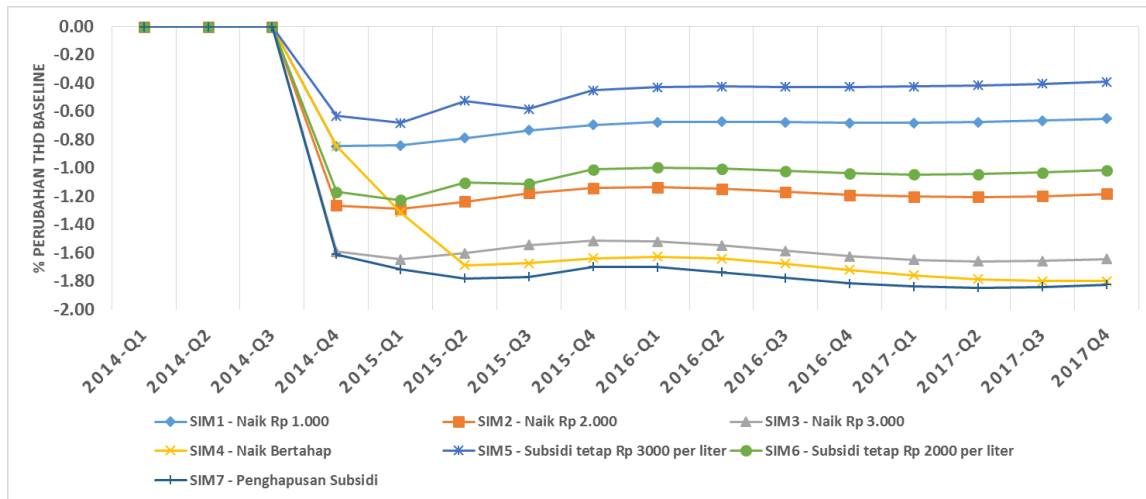
Gambar 4.5. Dampak Penyesuaian Harga Premium Terhadap Volume Konsumsi Pertamax (% perubahan terhadap *baseline*)

Berbeda dengan penurunan volume konsumsi premium yang terjadi relatif cepat, peningkatan volume konsumsi pertamax terjadi secara bertahap dalam jangka menengah. Dalam jangka menengah, konsumsi pertamax pada SIM1A, SIM2A, SIM3A, SIM4A, SIM5A, SIM6A, dan SIM7A mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,32%, 4,33%, 6,17%, 7,05%, 1,38%, 3,74%,0 dan 7,5%. Semakin besar kenaikan harga premium, maka semakin banyak konsumen yang beralih. Hal ini cukup menggembirakan, mengingat semakin banyak konsumen yang beralih ke pertamax, maka akan meringankan beban subsidi pemerintah.

Dari sisi volume, efek substitusi pengguna premium ke pertamax tidak terlalu besar karena pilihan substitusi ke pertamax hanya salah satu opsi respon terhadap kenaikan harga premium. Respon yang lain dapat berupa penghematan konsumsi premium, atau beralih ke moda transportasi lain. Sebagai informasi, pada tahun 2013 total konsumsi premium mencapai 29,5 juta kilo liter, sedangkan konsumsi pertamax dan pertamax plus mencapai 1 juta kilo liter.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian kebutuhan konsumsi premium dalam negeri dipasok dari impor, sehingga penurunan konsumsi premium juga akan berimbas pada penurunan jumlah impor. Selain itu, penurunan konsumsi rumah tangga juga turut menyumbang penurunan impor. Penurunan impor adalah salah satu faktor yang dapat mengerem laju penurunan GDP. Gambar 4.6 menunjukkan dampak penyesuaian harga premium terhadap impor. Pada Gambar 4.6, penurunan impor disajikan secara agregat, bukan per komoditas.

Ketika kondisi *equilibrium* sudah tercapai pada jangka menengah, kebijakan penyesuaian harga premium pada SIM1A, SIM2A, SIM3A, SIM4A, SIM5A, SIM6A, dan SIM7A akan membuat impor lebih rendah daripada *baseline* masing-masing sebesar 0,65%, 1,18%, 1,64%, 1,8%, 0,39%, 1,02%, dan 1,82%.



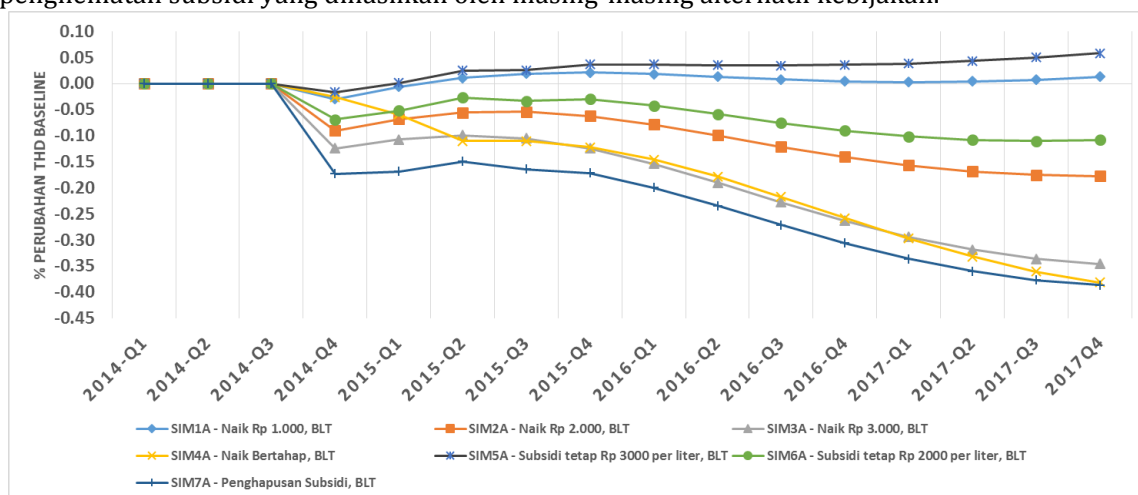
Sumber: Hasil Simulasi

Gambar 4.6. Dampak Penyesuaian Harga Premium Terhadap Impor (% perubahan terhadap *baseline*)

4.2. Dampak Berbagai Alternatif Kebijakan Penyesuaian Harga Premium dengan *Cash Transfer* (Bantuan Langsung Tunai)

Pada bagian ini akan dilakukan simulasi kebijakan yang sama, yaitu penyesuaian harga premium, namun kali ini kebijakan akan disertai dengan pemberian *cash transfer* atau bantuan langsung tunai (BLT) kepada rumah tangga. Pemberian BLT bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap rumah tangga miskin terhadap dampak kenaikan harga BBM. Pemberian BLT yang dilakukan secara terarah diharapkan mampu menjaga tingkat konsumsi dan mencegah penurunan kesejahteraan mereka.

Pemberian BLT dilaksanakan pada saat yang sama dengan diberlakukannya kenaikan harga premium, yaitu pada awal Kuartal-4 2014. Besaran BLT yang diberikan yaitu 50% dari penghematan subsidi premium. Penghematan yang dimaksud yaitu hanya penghematan subsidi premium pada Kuartal-4 2014 (bukan penghematan sepanjang tahun). Secara total, nilai BLT yang dikucurkan kepada rumah tangga berada pada kisaran Rp7,05 triliun s.d. Rp12,83 triliun, sesuai dengan penghematan subsidi yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif kebijakan.

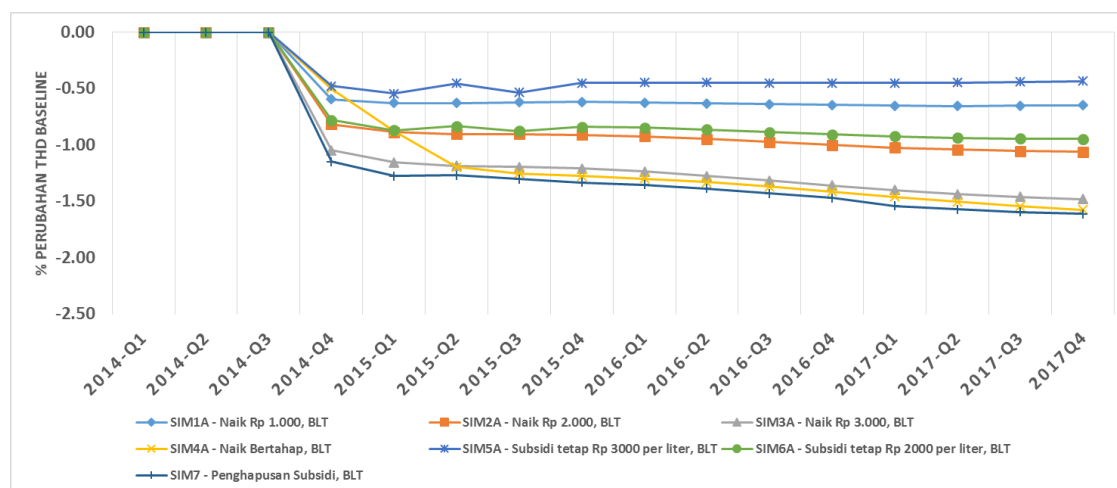


Sumber: Hasil Simulasi

Gambar 4.7. Dampak Penyesuaian Harga Premium Terhadap GDP (disertai BLT) (% perubahan terhadap *baseline*)

Sesuai dengan tujuannya, seharusnya BLT efektif mencegah penurunan tingkat kesejahteraan pada rumah tangga miskin, namun pada level makro pemberian BLT tersebut belum dapat mengurangi efek negatif dari kenaikan BBM secara signifikan. Pada akhir Q4 2014, pemberian BLT hanya mampu mengurangi laju perlambatan pertumbuhan GDP rata-rata sebesar 0,01% dibanding skenario kebijakan tanpa BLT.

Lebih detailnya, dalam jangka pendek, yaitu satu kuartal setelah dilakukan penyesuaian harga premium (akhir Q4 2014), kenaikan harga premium sebesar Rp1.000 plus BLT (SIM1B) akan membuat GDP menjadi lebih rendah daripada *baseline* sebesar 0,03%, sedangkan kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 plus BLT (SIM2B) akan membuat GDP lebih rendah daripada *baseline* sebesar 0,09%, dan kenaikan harga premium sebesar Rp3.000 plus BLT (SIM3B) akan membuat GDP lebih rendah daripada *baseline* sebesar 0,12%. Penyesuaian subsidi secara bertahap plus BLT (SIM4B) akan membuat GDP lebih rendah daripada *baseline* sebesar 0,03%, sedangkan kebijakan subsidi tetap yang diterapkan dalam SIM5B (subsidi tetap Rp3.000/liter plus BLT) dan SIM6B (subsidi tetap Rp2.000/liter plus BLT) masing-masing akan membuat GDP lebih rendah daripada *baseline* masing-masing sebesar 0,02% dan 0,07%. Penghapusan subsidi plus BLT pada SIM7B akan membuat GDP lebih rendah daripada *baseline* sebesar 0,17%.



Sumber: Hasil Simulasi

Gambar 4.8. Dampak Penyesuaian Harga Premium Terhadap Konsumsi Rumah Tangga (disertai BLT) (% perubahan terhadap *baseline*)

Gambar 4.8. menunjukkan dampak penyesuaian harga premium terhadap konsumsi rumah tangga apabila disertai dengan BLT. Dalam jangka pendek, yaitu pada kuartal pertama sampai dengan satu tahun setelah kebijakan diterapkan, kenaikan harga premium sebesar Rp1.000 plus BLT (SIM1B) akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 0,6% s.d. 0,63%, kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 plus BLT (SIM2B) akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 0,82% s.d. 0,9%, dan kenaikan harga premium sebesar Rp3.000 plus BLT (SIM3B) akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 1,05% s.d. 1,2%.

Masih dalam jangka pendek, penyesuaian harga premium secara bertahap plus BLT (SIM4B) akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 0,5% s.d. 1,25%. Kebijakan subsidi tetap plus BLT yang diterapkan dalam SIM5B (subsidi tetap Rp3.000/liter) akan membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 0,46% s.d. 0,55%, dan pada SIM6B (subsidi tetap Rp2.000/liter) membuat konsumsi rumah tangga lebih

rendah daripada *baseline* pada rentang 0,78% s.d. 0,88%. Penghapusan subsidi plus BLT pada SIM7B membuat konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada *baseline* pada rentang 1,15% s.d. 1,3%..

Bila dibandingkan dengan opsi kebijakan sebelumnya, maka pemberian BLT mampu mengurangi laju perlambatan konsumsi pada jangka pendek sebesar 0,24% pada SIM1B, 0,34% pada SIM2B, 0,33% pada SIM3B, 0,34% pada SIM4B, 0,18% pada SIM5B, 0,32% pada SIM6B, dan 0,36% pada SIM7B. Dari angka tersebut kita dapat melihat bahwa pemberian BLT ternyata mampu meredam dampak negatif kenaikan harga premium terhadap konsumsi rumah tangga. Meskipun tidak dapat meredam keseluruhan dampak negatif, namun kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi distribusi pendapatan karena rumah tangga miskin mempertahankan tingkat konsumsinya.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan penyesuaian harga Premium dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan *trade off* antara penghematan subsidi yang didapat oleh pemerintah dengan kinerja makro ekonomi. Satu kuartal setelah kebijakan diterapkan, berdampak pada terpengkasnya GDP dalam rentang yang tidak terlalu besar. Di lain pihak kebijakan tersebut mampu menghasilkan penghematan subsidi masing-masing sebesar Rp14,1 triliun, Rp19,2 triliun, Rp22,8 triliun, Rp24 triliun, Rp10,5 triliun, Rp17,8 triliun, dan Rp25,66 triliun (penghematan subsidi Q4- 2014).

Menurunnya konsumsi rumah tangga perlu menjadi perhatian utama pemerintah ketika menerapkan kebijakan penyesuaian harga Premium. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan yang relatif besar sebagai akibat dampak langsung dan tidak langsung kebijakan ini. Dampak langsung berasal dari kenaikan harga komoditas, sedangkan dampak tidak langsung berasal dari penurunan *disposable income*.

Pemberian BLT sebesar 50% dari penghematan beban subsidi BBM dan diberikan kepada kelompok rumah tangga miskin, mampu meredam dampak negatif kenaikan harga Premium terhadap konsumsi rumah tangga. Dengan adanya pemberian BLT, laju penurunan konsumsi jangka pendek dapat ditekan. Pemberian BLT mampu mengurangi laju perlambatan konsumsi pada jangka pendek sebesar 0,24% pada SIM1B, 0,34% pada SIM2B, 0,33% pada SIM3B, 0,34% pada SIM4B, 0,18% pada SIM5B, 0,32% pada SIM6B, dan 0,36% pada SIM7B.

Mekanisme subsidi tetap Premium layak untuk dipertimbangkan. Pada kebijakan subsidi tetapi yang coba diterapkan yaitu Rp3.000/liter dan Rp2.000/liter, penyesuaian harga konsumen Premium dilakukan per kuartal sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Hal tersebut membuat dampak dari perubahan harga Premium ke konsumsi rumah tanggamenjadi lebih *smooth*, sehingga dalam jangka panjang dapat meredam gejolak di rumah tangga akibat penyesuaian harga Premium.

Selain itu subsidi tetap dapat menekan jumlah subsidi yang harus dibayar pemerintah. Selama ini subsidi yang dibayarkan pemerintah tergantung pada nilai tukar rupiah dan harga minyak internasional yang sifatnya fluktuatif. Pada lima tahun terakhir rata-rata rupiah mengalami pelemahan hampir 7% per tahun, sedangkan harga minyak dunia rata-rata mengalami kenaikan lebih dari 4% per tahun. Dengan menggunakan mekanisme subsidi tetap, maka risiko kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah dapat ditransfer kepada konsumen dan atau produsen dan tidak menjadi tanggungan pemerintah semata dalam bentuk pembengkakan belanja subsidi BBM.

Kenaikan harga Premium juga akan memberikan efek substitutif, membuat sebagian konsumen beralih dari Premium ke Pertamina (BBM non-subsidi). Hal tersebut dikarenakan *range*

harga antara Premium dan Pertamina menjadi lebih dekat setelah adanya penyesuaian harga. Semakin besar kenaikan harga Premium, maka semakin banyak konsumen yang beralih. Hal ini cukup menggembirakan, mengingat semakin banyak konsumen yang beralih ke Pertamina, maka akan meringankan beban subsidi pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan ungkapan terima kasih tulus kepada: (1) Ir. Kasbani, M.Sc. selaku Kepala P3TKEBTKE, Balitbang ESDM, Kementerian ESDM atas dukungan pendanaan dalam pengembangan Model IndoCEEC; (2) Prof. J. Mark Horridge dan Dr. Louise Roos dari Center of Policy Studies (CoPS), Victoria University, Australia atas *sharing* ilmunya dalam pengembangan model CGE dinamik ini; dan (3) Hadi Susanto dan Tim dari BPS atas bantuannya dalam proses disagregasi sektor energi dalam Tabel IO sebagai basis penyusunan database model.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, H. (2011). *Tax Policy, Growth, and Income Distribution in Indonesia: A Computable General Equilibrium Analysis*. Unpublished PhD Thesis, the University of Queensland, Brisbane.
- Amir, H. (2012), "Manajemen Risiko Fiskal Harga Minyak," *Majalah Info Risiko Fiskal*, #1/2012.
- Amir, H., J. A. Adjaye & T. Ducpham. (2013). The Impact of the Indonesian Income Tax Reform: A CGE Analysis. *Economic Modeling*, 31, 492-501.
- Amir, H. (2014). *Evaluasi Kritis Formula Subsidi BBM dan Usulan Solusinya*. Policy Paper – Badan Kebijakan Fiskal.
- Aswicahyono, H., et al. (2011). *Penyesuaian Subsidi BBM: Pilihan Rasional Penyelamatan Ekonomi*. Naskah Kebijakan - Mei 2011. Jakarta: CSIS.
- Dartanto, T. (2013). Reducing fuel subsidies and the implication on fiscal balance and poverty in Indonesia: A simulation analysis. *Energy Policy*, 58, 117-134.
- Corong, E. & Horridge, J.M. (2012). *PHILGEM: A SAM-based Computable General Equilibrium Model of the Philippines*. Centre of Policy Studies, Monash University. Available on line at <http://www.copsmodels.com/ftp/workpapr/g-227.pdf>.
- Horridge, J.M. (2002). *ORANIG-RD: A Recursive Dynamic Version of ORANI-G*. Centre of Policy Studies, Monash University. Available on line at <http://www.copsmodels.com/ftp/oranig/oranigrd.zip>.
- Ikhsan, M., T. Dartanto, Usman, & H. Sulistyono. (2005). Kajian Dampak Kenaikan Harga BBM 2005 terhadap Kemiskinan. *LPEM Working Paper* <http://www.lpem.org>.
- Nasir, M., & Insyafiah. (2012). *Hulu Migas, Pertamina, dan Kesenambungan Fiskal*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Oktaviani, R. (2000). *The Impact of APEC Trade Liberalisation on Indonesian Economy and Its Agricultural Sector*. Ph.D thesis. The Sydney University.
- Oktaviani, R., & Sahara. (2005). Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Kinerja Ekonomi Makro, Keragaan Ekonomi Sektoral dan Rumah Tangga di Indonesia: Suatu Pendekatan Model Ekonomi Keseimbangan Umum Recursive Dynamic. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 1(3), 35-52.
- Rachbini, D. J., et al. (2013). Subsidi Energi dan BBM, Pengaruhnya Terhadap Industri. Policy Paper No. 13 Januari 2013. Jakarta: Tim ACTIVE Kadin Indonesia.
- Setyawan, D. (2014). The Impacts of the Domestic Fuel Increases on Prices of the Indonesian Economic Sectors. *Energy Procedia*, 47, 47-55.

- Wittwer, G. (1999). *WAYANG: A General Equilibrium Model Adapted for the Indonesian Economy*. Edition prepared for Australian Center of Agricultural Research (ACIAR) Project no. 9449. Center of International Economic Studies (CIES), University of Adelaide (in association with Australian National University (ANU), Center of Agricultural Social Economic Research (CASER), and Center of Strategic International Studies (CSIS).
- Yusuf, A. A. & B. P. Resosudarmo. (2008). Mitigating Distributional Impact of Fuel Pricing Reform: Indonesian Experience. *ASEAN Economic Bulletin*, 25 (1), 32-47.
- Yusuf, A. A. & B. P. Resosudarmo. (2011). Is Reducing Subsidies on Vehicle Fuel Equitable? A Lesson from Indonesian Reform Experience. *Fuel Taxes and the Poor*, Ch.9, RFF Press.